

LAPORAN TAHUNAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN TAHUN 2014



KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kinerja BPPSDMP selama tahun 2014.

Laporan ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yaitu Bab I berisi Pendahuluan, Bab II menguraikan Organisasi dan Tata Kerja, Bab III menguraikan Program, Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan, Bab IV menguraikan Permasalahan dan Upaya Tindak Lanjut serta Bab V Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan BPPSDMP Tahun 2014 ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan sumbang saran dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka perbaikan laporan ini dan pelaksanaan kegiatan BPPSDMP ke depan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian laporan ini.

Jakarta, Februari 2015

Kepala Badan,



Dr. Ir. Winny Dian Wibawa, M. Sc

NIP. 19590329 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan.....	5
C. Output	5
II. ORGANISASI	6
A. Dasar Hukum dan Tata Kerja	6
B. Keragaan Sumber Daya Manusia Organisasi	13
III. RENCANA DAN REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	14
A. Program dan Kegiatan	14
B. Rencana Anggaran dan Kegiatan	14
1. Alokasi Anggaran	14
2. Rencana Kegiatan Utama dan Target Sasaran.....	15
a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.....	15
b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.....	16
c. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	18
d. Pendidikan Menengah Pertanian	19
e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.....	19
C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan.....	20
1. Realisasi Anggaran.....	21
2. Realisasi Kegiatan.....	21

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian.....	21
b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.....	23
c. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	25
d. Pendidikan Menengah Pertanian	27
e. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.....	28
IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT.....	30
A. Permasalahan	30
B. Upaya Tindak Lanjut	32
V. PENUTUP	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2014.....	17
Tabel 2.	Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2014.....	18
Tabel 3.	Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2014.....	19
Tabel 4.	Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2014.....	20
Tabel 5.	Rencana Kegiatan dan Target Sasaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014	21
Tabel 6.	Realisasi Anggaran BPPSDMP Per Jenis Belanja Tahun 2014.....	22
Tabel 7.	Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Per Kegiatan Utama Tahun 2014.....	22
Tabel 8.	Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Per Satker Tahun 2014.....	23
Tabel 9.	Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Tahun 2014	24
Tabel 10.	Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian Tahun 2014	26
Tabel 11.	Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2014.....	28
Tabel 12.	Realisasi Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian Tahun 2014.....	30
Tabel 13.	Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian di BP3K	25
Gambar 2.	Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SL-PTT	26
Gambar 3.	Pelaksana Diklat Teknis Budidaya Kelapa Sawit di BPP Jambi.....	27
Gambar 4.	Proses Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Gowa	29
Gambar 5.	Acara Wisuda Nasional STPP Tahun 2014	29
Gambar 6.	Kegiatan Praktek Lapang oleh siswa di SMK-PP Banjarbaru	30
Gambar 7.	Kegiatan Belajar Mengajar di Laboratorium SMK-PP Kupang.....	31
Gambar 8.	Kegiatan Koordinasi dalam Rapat Pimpinan Lingkup BPPSDMP	32

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Badan PPSDMP
- Lampiran 2. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan
- Lampiran 3. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan
- Lampiran 4. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan jenis kelamin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isue-isue strategis dalam pembangunan pertanian saat ini dan selama satu dekade mendatang meliputi globalisasi ekonomi, perubahan ekstrim iklim dan lingkungan hidup, kerawanan pangan global, kemiskinan dan pengangguran, serta penurunan minat generasi muda pada sektor pertanian (*second generation problems*).

Menyikapi isue strategis tersebut dan berbagai kondisi negatif yang mungkin timbul, maka sektor pertanian tetap memiliki peran strategis sebagai penghela sekaligus pendorong pembangunan ekonomi nasional, karena kontribusinya yang nyata dalam hal penyediaan bahan baku industri, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan usaha dan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat pertanian yang masih merupakan bagian dominan dari penduduk Indonesia.

Upaya mewujudkan peran strategis sektor pertanian sebagai penghela dan pendorong pembangunan ekonomi nasional, Kementerian Pertanian pada periode 2010-2014 telah menetapkan visi pembangunan pertanian yang diimplementasikan kedalam program kerja Kementerian Pertanian selama periode tersebut. Visi Kementerian Pertanian selama 5 tahun adalah: **“terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing, ekspor, dan kesejahteraan petani”**. Target penetapan visi pembangunan pertanian adalah mewujudkan empat sukses pembangunan pertanian, yaitu:

1. Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
2. Peningkatan diversifikasi pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Pencapaian sukses pembangunan pertanian, memerlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang handal profesional. Oleh karena itu upaya menyiapkan, menghasilkan dan mengembangkan SDM pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global perlu terus dilakukan melalui pendidikan,

pelatihan, dan penyuluhan pertanian, serta pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk:

1. Memperkuat kelembagaan petani;
2. Memberdayakan dan mengembangkan usaha petani;
3. Mewujudkan pelaku utama pembangunan pertanian yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing, sehingga mampu mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian menjadi tugas fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Selaras dengan visi pembangunan pertanian yang ditetapkan Kementerian Pertanian dan sesuai dengan tugas fungsi, pada periode 2010-2014, BPPSDMP telah menetapkan visi organisasi, yaitu: **“terwujudnya sumberdaya manusia pertanian yang profesional, kreatif, inovatif dan berwawasan global dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, ekspor, dan kesejahteraan petani”**.

Upaya pencapaian visi BPPSDMP tersebut, dilakukan melalui empat misi, yaitu:

1. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang komprehensif dan terpadu;
2. Mengembangkan sistem pelatihan pertanian yang berbasis kompetensi;
3. Merevitalisasi sistem pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian yang kredibel; serta
4. Memantapkan sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan visi dan misi BPPSDMP, tujuan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama lima tahun 2010 - 2014 adalah:

1. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani;

2. Meningkatkan kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non-aparatur pertanian;
3. Menghasilkan aparatur dan non-aparatur pertanian yang kompeten dan tersertifikasi;
4. Meningkatkan pelayanan, tata kelola administrasi dan manajemen yang efektif, efisien dan akuntabel.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian untuk lima tahun (2010-2014) adalah:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kompetensi penyuluh yang bersifat polivalen di tingkat desa dan spesialis di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat;
2. Penempatan satu penyuluh satu desa untuk mendukung komoditas unggulan;
3. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan mendukung pencapaian target utama pembangunan pertanian;
4. Penguatan kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan pertanian petani sebagai pusat pembelajaran yang andal dan mandiri;
5. Pengembangan kualitas pendidikan tinggi kedinasan pertanian yang mampu menghasilkan tenaga fungsional Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) dan tenaga karantina pertanian yang profesional dan kompeten;
6. Peningkatan kualitas pendidikan menengah pertanian yang mampu menghasilkan tenaga teknis pertanian tingkat menengah dan wirausahawan muda pertanian;
7. Pengembangan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian untuk memenuhi kebutuhan SDM pertanian yang profesional dan kompeten;
8. Pemantapan sistem administrasi dan manajemen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.

Strategi yang ditempuh dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian selama tahun 2010-2014 meliputi:

1. Penataan dan penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Pusat;
2. Pengembangan program dan sistem informasi penyuluhan pertanian yang mendukung empat sukses pembangunan pertanian sertaantisipasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan;

3. Penataan serta peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian melalui optimalisasi peran Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya, dan Penyuluh Swasta;
4. Penataan dan pengembangan usahatani yang mandiri dan berdaya saing;
5. Penataan dan peningkatan kompetensi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
6. Peningkatan jumlah dan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian yang profesional dan kredibel;
7. Peningkatan jumlah dan mutu penyelenggaraan pelatihan aparatur pertanian dan non-aparatur pertanian;
8. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan pertanian;
9. Akreditasi kelembagaan pelatihan pertanian pemerintah dan kelembagaan pelatihan petani (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya/P4S).
10. Restrukturisasi kelembagaan dan pengembangan program studi pendidikan tinggi kedinasan pertanian;
11. Pengembangan kelembagaan pendidikan menengah kejuruan pertanian;
12. Penumbuhkembangan wirausahawan muda di bidang pertanian;
13. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pertanian;
14. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Lembaga Diklat Profesi (LDP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang pertanian;
15. Pemantapan tata kelola organisasi dan kepegawaian;
16. Pemantapan sistem perencanaan;
17. Pemantapan sistem pengelolaan keuangan dan perlengkapan;
18. Pemantapan sistem pengendalian, evaluasi, pelaporan dan kehumasan.

Tahun 2014 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP Tahun 2010-2014. Selama kurun waktu 2010 – 2014, pelaksanaan program BPPSDMP dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010, program BPPSDMP masih disusun dengan mengacu pada Program Kementerian Pertanian dan Bappenas tahun 2009, yaitu: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; Program Pendidikan Tinggi; dan Program Pendidikan Menengah.
2. Pada tahun 2011 telah diberlakukan penerapan program berbasis kinerja, maka setiap Eselon I hanya memiliki 1 program yang mencerminkan tugas

fungsinya. Selama tahun 2010 - 2014, Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab BPPSDMP adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Mengacu kepada Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani tersebut, kegiatan utama pada tahun 2014 meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian;
3. Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; serta
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian harus diselenggarakan secara konsisten dan berkelanjutan, baik di Pusat maupun di Daerah. Keberagaman hasil penyelenggaraan kegiatan tersebut, wajib dilaporkan kepada para pemangku kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja tahun 2014, maka disusun **Laporan Tahunan BPPSDMP**.

B. Tujuan

Penyusunan **Laporan Tahunan** bertujuan untuk memberikan informasi penyelenggaraan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.

C. Output

Output laporan tahunan berupa informasi mengenai penyelenggaraan program dan kegiatan BPPSDMP selama tahun 2014, meliputi rencana dan realisasi program, kegiatan, anggaran, permasalahan dan upaya tindaklanjut yang perlu dilakukan pada tahun mendatang

BAB II

ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Tata Kerja

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, maka nomenklatur **Departemen Pertanian** berubah menjadi **Kementerian Pertanian**.

Demikian pula nomenklatur **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian** (BPSDMP) mengalami perubahan menjadi **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian** (BPPSDMP).

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas BPPSDMP adalah melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, BPPSDMP mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
4. Pelaksanaan administrasi BPPSDMP.

Pelaksanaan tugas fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II, yaitu:

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;

3. Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
4. Sekretariat BPPSDMP.

Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penyuluhan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian; serta
4. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani dan usahatani.

Struktur organisasi Pusat Penyuluhan Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Informasi terdiri atas:
 - a. Subbidang Program dan Kerjasama;
 - b. Subbidang Informasi dan Materi.
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan terdiri atas:
 - a. Subbidang Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Subbidang Ketenagaan Penyuluhan.
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Usahatani terdiri atas:
 - a. Subbidang Kelembagaan Petani;
 - b. Subbidang Usahatani.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pelatihan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian;
2. Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan pertanian;

3. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan ketenagaan pelatihan pertanian.

Struktur organisasi Pusat Pelatihan Pertanian terdiri atas dari 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Subbidang Program;
 - b. Subbidang Kerjasama.
2. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan terdiri atas:
 - a. Subbidang Kelembagaan Pelatihan;
 - b. Subbidang Ketenagaan Pelatihan.
3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan terdiri atas:
 - a. Subbidang Sistem dan Metode;
 - b. Subbidang Evaluasi Penyelenggaraan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, kerjasama, dan pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Pelaksanaan pengembangan di bidang pendidikan pertanian; dan
3. Pelaksanaan penyusunan di bidang standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.

Sama halnya dengan Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pusat Pelatihan Pertanian, maka struktur organisasi Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian terdiri atas 3 bidang, 6 subbidang, dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Bidang Program dan Kerjasama terdiri atas:
 - a. Subbidang Program;
 - b. Subbidang Kerjasama.

2. Bidang Pendidikan terdiri atas:
 - a. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Subbidang Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan.
3. Bidang Standardisasi dan Sertifikasi Profesi terdiri atas:
 - a. Subbidang Standardisasi Kompetensi;
 - b. Subbidang Sertifikasi Profesi;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat BPPSDMP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPPSDMP. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSDMP menyelenggarakan fungsi-fungsi:

1. Koordinasi, dan penyusunan rencana dan program penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi dan penyempurnaan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan urusan kepegawaian;
4. Evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik; serta
5. Pelaksanaan urusan tata usaha BPPSDMP.

Struktur organisasi Sekretariat BPPSDMP terdiri atas 4 Bagian dan 12 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu:

1. Bagian Perencanaan, dengan Subbagian Program dan Kerjasama; Subbagian Data SDM dan Ketenagakerjaan Pertanian; serta Subbagian Anggaran;
2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengan Subbagian Subbagian Perbendaharaan; Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; serta Subbagian Perlengkapan;
3. Bagian Umum, dengan Subbagian Hukum dan Organisasi; Subbagian Kepegawaian; serta Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan, dengan Subbagian Evaluasi; Subbagian Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan Subbagian Hubungan Masyarakat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BPPSDMP dapat dilihat pada lampiran 1.

Selain didukung oleh 4 unit organisasi Eselon II di Pusat, BPPSDMP juga memiliki 19 UPT (20 Satuan Kerja/Satker) yang berlokasi di daerah. Jumlah UPT BPPSDMP terdiri dari 9 UPT Pendidikan Pertanian (6 UPT setingkat Eselon II, yaitu Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian/STPP, dan 3 UPT Pendidikan Menengah Pertanian, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan/SMK-PP).

Sejak terbitnya Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2223/M.PAN-RB/07/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, ditetapkan perubahan nomenklatur Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri (SPPN) menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN).

Selain 9 UPT Pendidikan, BPPSDMP didukung oleh 10 UPT Pelatihan Pertanian (8 UPT setingkat Eselon II, yaitu 1 Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian atau PPMKP, 7 Balai Besar Pelatihan Pertanian/Peternakan/Kesehatan Hewan atau BBPP/BBPKH, dan 2 UPT setingkat Eselon III, yaitu Balai Pelatihan Pertanian/BPP).

Secara lengkap, masing-masing UPT BPPSDMP adalah sebagai berikut:

1. UPT Pendidikan Pertanian
 - a. STPP Medan Sumatera Utara (1 Satker);
 - b. STPP Bogor Jawa Barat (1 Satker);
 - c. STPP Magelang Jawa Tengah (2 Satker);
 - d. STPP Malang Jawa Timur (1 Satker);
 - e. STPP Gowa Sulawesi Selatan (1 Satker);
 - f. STPP Manokwari Papua Barat (1 Satker);
 - g. SMK-PPN Sembawa Palembang Sumatera Selatan (1 Satker);
 - h. SMK-PPN Banjarbaru Kalimantan Selatan (1 Satker);
 - i. SMK-PPN Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker).
2. UPT Pelatihan Pertanian
 - a. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/PPMKP Ciawi-Bogor Jawa Barat (1 Satker);
 - b. Balai Besar Pelathan Kesehatan Hewan/BBPKH Cinagara-Bogor Jawa Barat (1 Satker);

- c. Balai Besar Pelatihan Pertanian/BBPP Lembang Jawa Barat (1 Satker);
- d. Balai Besar Pelatihan Pertanian/BBPP Ketindan Malang Jawa Timur (1 Satker);
- e. Balai Besar Pelatihan Peternakan/BBPP Batu Jawa Timur (1 Satker);
- f. Balai Besar Pelatihan Peternakan/BBPP Kupang Nusa Tenggara Timur (1 Satker);
- g. Balai Besar Pelatihan Pertanian/BBPP Binaung Kalimantan Selatan (1 Satker);
- h. Balai Besar Pelatihan Pertanian/BBPP Batangkaluku Sulawesi Selatan (1 Satker);
- i. Balai Pelatihan Pertanian/BPP Jambi (1 Satker);
- j. Balai Pelatihan Pertanian/BPP Lampung (1 Satker).

Dasar hukum kelembagaan UPT lingkup BPPSDMP masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor: 20/2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 550/Kpts/ OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 367/Kpts/OT.210/6/200 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 554/ Kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 368/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
2. Keputusan Presiden Nomor: 58/2002 tentang Pendirian STPP Medan, STPP Magelang, STPP Gowa dan STPP Manokwari, yang ditindaklanjuti dengan:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Medan;
 - b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Manokwari;
 - c. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Gowa;
 - d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja STPP Magelang.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 100/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 101/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 102/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 103/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 104/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 106/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 107/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 108/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Jambi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 109/Permentan/OT.140/10/2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 110/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri.

Selain di Pusat dan di UPT, kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian juga dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan sumber anggaran dari DIPA BPPSDMP. Satker tersebut adalah Satker Dekonsentrasi di Tingkat Provinsi dan Satker Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota seperti Dinas Pertanian Provinsi atau Kabupaten/Kota, Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh)

Provinsi, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi atau Kabupaten/Kota.

B. Keragaan Sumberdaya Manusia Organisasi BPPSDMP

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan PPSDMP didukung oleh 2.275 orang aparat, yang terdiri atas aparat yang bertugas di pusat sebanyak 386 orang dan di daerah (UPT Pusat) sebanyak 1.889 orang. Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan golongan terdiri atas: golongan I sebanyak 133 orang; golongan II sebanyak 596 orang; golongan III sebanyak 1.219 orang, dan golongan IV sebanyak 327 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 2.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas: S3 (Doktor) sebanyak 56 orang, S2 (magister) sebanyak 475 orang, S1/D4 (sarjana/ diploma) sebanyak 798 orang, S0 (D1-D3) sebanyak 91 orang, SLTA sebanyak 624 orang, SLTP sebanyak 91 orang dan SD sebanyak 140 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

Komposisi pegawai Badan PPSDMP berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas: Laki-laki sebanyak 1.535 orang, dan perempuan sebanyak 740 orang. Secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 4.

BAB III

RENCANA DAN REALISASI PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program dan Kegiatan

Program yang dikelola dan menjadi tanggung jawab BPPSDMP pada tahun 2014 adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Operasionalisasi Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani tersebut diwujudkan melalui program-program aksi atau kegiatan utama BPPSDMP yaitu:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian;
3. Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian,
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

B. Rencana Anggaran dan Kegiatan

1. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2014 dalam rangka membiayai satker di tingkat pusat dalam mendukung kinerja 4 unit kerja Eselon II, yaitu Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, Pusat Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, serta Sekretariat Badan PPSDMP dan Kegiatan READ. Selain itu anggaran diperuntukan untuk 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 5 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan).

Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sesuai DIPA Induk Nomor : SP DIPA-018.10-0/AG/2014 Nomor DS : 6690-9826-2134-9479 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp1.149.818.700.000,-

- b. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, anggaran Badan PPSDMP menjadi Rp 1.098.836.025.000,- (Revisi Bulan Juli 2014);
- c. Anggaran BPPSDMP Tahun 2014 setelah mendapat alokasi APBN-P terkait kegiatan READ menjadi Rp 1.114.779.025.000,- (Revisi bulan Juli 2014);
- d. Anggaran BPPSDMP direvisi setelah penambahan PNPB BBPP Batu, sehingga menjadi Rp 1.114.979.737.000,- (Revisi Bulan November 2014).

2. Rencana Kegiatan Utama dan Target Sasaran

Operasionalisasi Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani pada tahun 2014 diwujudkan melalui kegiatan utama yaitu:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian;
3. Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Target sasaran dalam kegiatan utama tersebut merupakan dukungan terhadap empat sukses pembangunan pertanian yaitu:

1. Swasembada dan swasembada berkelanjutan;
2. Diversifikasi pangan;
3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor;
4. Peningkatan kesejahteraan petani.

Adapun target sasaran per kegiatan utama dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Pemantapan sistem penyuluhan pertanian terdiri dari 4 kegiatan yaitu fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian; fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani; fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian; dan dokumen Program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan. Target sasaran pada kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Tahun 2014

No.	Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
1.	Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (unit)	1.577	Bakorluh; Bapeluh; BP3K
2	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani	6.452	Poktan dan Gapoktan
	- Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan (unit)		
	- Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT (unit)	13.635	Demfarm dan lokasi pengawasan penyuluh SLPTT Sentra produksi.
	Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian	50.248	BOP bagi Penyuluh PNS dan THL-TBPP, serta Honor bagi THL-TBPP dan Pembinaan
	- Fasilitasi ketenagaan penyuluhan (orang)		
	- Pembinaan ketenagaan penyuluhan (orang)	1.105	Ketenagaan Penyuluhan
4.	Dokumen Program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen).	2.802	Langganan tabloid Sinar Tani, serta materi informasi di pusat berupa cyber extension, media televisi, media radio, media cetak, majalah ekstensia, materi informasi tercetak.

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Pemantapan sistem pelatihan terdiri dari:

1. Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan;
2. Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan;
3. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian;
4. Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian;
5. Peningkatan kapasitas desa melalui program READ;
6. Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani;
7. Dokumen perencanaan, keuangan, serta Monev Program READ;

8. Dokumen program dan kerjasama, penyelenggaraan, ketenagaan, kelembagaan dan evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan. Secara rinci target dan sasaran dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Tahun 2014

No.	Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
1.	Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	9.599	Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian, pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian dan pelatihan fungsional pertanian di UPT Pelatihan Pusat dan Daerah.
2.	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	3.791	Pelaku utama dan pelaku usaha yang mengikuti pelatihan teknis pertanian dan pelatihan manajemen kewirausahaan pertanian.
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian (unit)	25	UPT Pelatihan Pusat dan UPT Pelatihan Daerah.
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian (orang)	2.438	Widyaiwara dan tenaga kediklat-an serta instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan
5.	Peningkatan kapasitas desa melalui program READ (desa)	150	Desa pelakana kegiatan READ di 5 kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah.
6.	Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani (unit)	299	Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang difasilitasi dan diklasifikasi
7.	Dokumen perencanaan, keuangan, serta Monev Program READ (dokumen)	138	Kegiatan pendukung READ
8.	Dokumen Program dan Kerjasama, penyelenggaraan, ketenagaan, kelembagaan dan evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan (dokumen)	197	Kegiatan pendukung pemantapan sistem pelatihan pertanian
9.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	Dukungan administrasi dan pelayanan perkantoran Pusat Pelatihan Pertanian dan UPT Pelatihan Pertanian

c. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian terdiri dari:

1. Pendidikan formal pasca sarjana bagi aparatur pertanian;
2. Pendidikan tinggi kedinasan bagi aparatur pertanian;
3. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian;
4. Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian;
5. Standardisasi profesi bidang pertanian;
6. Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian.

Tabel 3.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi Dan
Sertifikasi Profesi Pertanian
Tahun 2014

No.	Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
1.	Pendidikan formal pasca sarjana bagi aparatur pertanian (orang)	230	PNS lingkup Pertanian yang telah memenuhi persyaratan tugas belajar dan mengikuti tugas belajar di Perguruan Tinggi Negeri.
2.	Pendidikan tinggi kedinasan bagi aparatur pertanian (orang)	2.651	PNS lingkup pertanian mahasiswa STPP.
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan pertanian (unit)	183	Fasilitasi bagi kelembagaan STPP, LSP, dan TUK
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan pertanian (orang)	736	Dosen dan tenaga kependidikan tinggi pertanian.
5.	Standardisasi profesi bidang pertanian (dokumen)	3	Dokumen SKNNI.
6.	Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian (orang)	500	SDM pertanian yang mengikuti sertifikasi profesi.
7.	Dokumen Program dan Kerjasama Bidang Pendidikan Pertanian yang dihasilkan (dok)	27	Kegiatan pendukung revitalisasi sistem pendidikan standardisasidan sertifikasi profesi pertanian
8.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	Dukungan administrasi dan pelayanan perkantoran Pusdikdarkasi dan UPT STPP

d. Pendidikan Menengah Pertanian

Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian mencakup pula dengan kegiatan pendidikan menengah pertanian. Pendidikan menengah pertanian terdiri dari kegiatan:

1. Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian;
2. Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-SPP;
3. Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-SPP. Rincian dan target sasaran tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Pendidikan Menengah Pertanian
Tahun 2014

No.	Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
1.	Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian (orang)	18.077	Fasilitasi bagi siswa SMK-PP di SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-SPP (unit)	442	SMK-PP UPT BPPSDMP dan eks-UPT BPPSDMP.
3.	Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-SPP (orang)	744	Guru dan tenaga pendidikan menengah di SMK-PP
4.	Dokumen Program dan kerjasama pendidikan pertanian yang dihasilkan (dok)	23	Kegiatan pendukung pendidikan menengah pertanian
5.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	Dukungan administrasi dan pelayanan perkantoran UPT Pendidikan Menengah Pertanian

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya terdiri dari kegiatan utama:

1. Penyediaan dokumen perencanaan, perundang-undangan, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan serta evaluasi, pelaporan dan kehumasan;
2. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan perkantoran.

Tabel 5.
Rencana Kegiatan dan Target Sasaran
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Tahun 2014

No.	Rencana Kegiatan	Target	Sasaran
1.	Penyediaan dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan BPPSDMP (dok)	281	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya kegiatan kesekretariatan BPPSDMP
2.	Fasilitasi pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	Kantor Pusat Badan PPSDMP

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2014, secara menyeluruh mencapai 95,46% yaitu sebesar Rp1.064.409.751.629,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.114.979.737.000,-.

Realisasi anggaran per jenis belanja tertinggi adalah belanja sosial sebesar 98,43% dan terendah adalah belanja pegawai 94,42%. Rincian realisasi per jenis belanja tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6.
Realisasi Anggaran BPPSDMP
Per Jenis Belanja Tahun 2014

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	%
1.	Belanja Pegawai	137.655.689	129.971.944	94,42
2.	Belanja Barang	940.527.012	898.443.658	95,33
3.	Belanja Modal	21.236.534	20.677.882	97,37
4.	Bantuan Sosial	15.560.502	15.316.268	98,43
Total		1.114.979.737	1.064.409.752	95,46

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama yang tertinggi adalah Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar 95,91% dan terendah adalah Pendidikan Menengah Pertanian sebesar 92,50% . Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7.
Realisasi Anggaran Badan PPSDMP
Per Kegiatan Utama Tahun 2014

No.	Kegiatan Utama	Pagu	Realisasi	%
1.	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	652.218.167.000	624.415.226.439	95,74
2.	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	227.560.453.000	218.257.659.910	95,91
3.	Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian	129.050.105.000	123.206.536.500	95,47
4.	Pendidikan Menengah Pertanian	55.610.000.000	51.438.730.768	92,50
5.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	50.541.012.000	47.091.598.012	93,18
Total		1.114.979.737.000	1.064.409.751.629	95,46

Realisasi anggaran berdasarkan satker yang tertinggi adalah satker tugas pembantuan (READ) sebesar 98,43% dan terendah adalah satker pusat sebesar 92,62%. Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan satker tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8.
Realisasi Anggaran Badan PPSDMP
Per Satker Tahun 2014

No.	Satker	Pagu (Rp 000)	Realisasi (Rp 000)	%
1.	Pusat	140.830.510	130.438.036	92,62
2.	UPT	315.497.506	301.637.306	95,61
3.	Dekonsentrasi	638.743.707	612.738.574	95,93
4.	Tugas Pembantuan (READ)	19.908.014	19.595.835	98,43
Total		1.114.979.737	1.064.409.752	95,46

2. Realisasi Kegiatan

a. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Seperti disajikan pada Tabel 7, realisasi anggaran kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian sampai dengan Desember 2014, tercatat mencapai Rp 624.415.226.439,- (95,74%). Ada 4 kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yang rata-rata direalisasikan mencapai **98,54%**. Secara rinci realisasi kegiatan pada Tabel 9.

Tabel 9.
Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
Tahun 2014

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Fasilitasi kelembagaan penyuluhan pertanian (unit).	1.577	1.577	100,00
2	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan petani	6.452	6.206	96,19
	- Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan (unit)			
	- Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di Lokasi SL-PTT (WKPP)	13.635	13.102	96,09
3	Fasilitasi ketenagaan penyuluhan pertanian. (orang)	50.248	49.736	98,98
	- Fasilitasi ketenagaan penyuluhan (orang)			
	- Pembinaan ketenagaan penyuluhan (orang)	1.105	1.105	100,00
4	Dokumen Program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (dokumen).	2.802	2.802	100,00
Rata-rata				98,54



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Pertanian di BP3K

Seperti disajikan pada Tabel 9, realisasi kegiatan tertinggi adalah **fasilitasi bagi dokumen program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan** sedangkan realisasi terendah adalah **fasilitasi dan pengembangan kelembagaan petani**.

Capaian terendah disebabkan karena masih terdapat kegiatan *demfarm* di lapang yang tidak direalisasikan. Beberapa satker atau petani/kelompok tani yang tidak bersedia merealisasikan *demfarm* disebabkan, karena kekurangan SDM atau belum terbiasa oleh komoditas yang dianjurkan.



Gambar 2. Pengawasan dan Pendampingan Penyuluh di lokasi SL-PTT

Fasilitasi ketenagaan penyuluhan tidak teralisasi 100% karena dalam perjalanannya jumlah penyuluh (Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TB Penyuluh Pertanian) mengalami perubahan, yang disebabkan pensiun, mengundurkan diri, beralih fungsi ke struktural, pindah pekerjaan atau meninggal dunia.

b. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran pada kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar 95,91% (Tabel 7). Ada 9 kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian dengan rata-rata capaian sebesar 107,81%, dengan rincian tersaji pada Tabel 10.

Tabel 10.
Realisasi Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
Tahun 2014

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Peningkatan kompetensi aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	9.599	10.373	108,06
2	Peningkatan kompetensi non aparatur pertanian melalui pelatihan (orang)	3.791	4.062	107,15
3	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian (unit)	25	25	100,00
4	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pelatihan pertanian (orang)	2.438	2.480	101,72
5	Peningkatan kapasitas desa melalui program READ (desa)	150	150	100,00
6	Fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani (unit P4S)	299	448	149,83
7	Dokumen perencanaan, keuangan, serta Monev Program READ (dokumen)	138	138	100,00
8	Dokumen Program dan Kerjasama, penyelenggaraan, ketenagaan, kelembagaan dan evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan (dokumen)	197	204	103,55
9.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	100,00
Rata-rata				107,81

Seperti disajikan pada Tabel 10, realisasi kegiatan tertinggi adalah fasilitasi dan klasifikasi kelembagaan petani (P4S).



Gambar 3. Pelaksana Diklat Teknis Budidaya Kelapa Sawit di BPP Jambi

c. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

Realisasi anggaran pada kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian sebesar 95,47% (Tabel 7). Capaian realisasi fisik rata-rata sebesar 97,28% dengan rincian tersaji pada Tabel 11.

Tabel 11.
Realisasi Kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian Tahun 2014

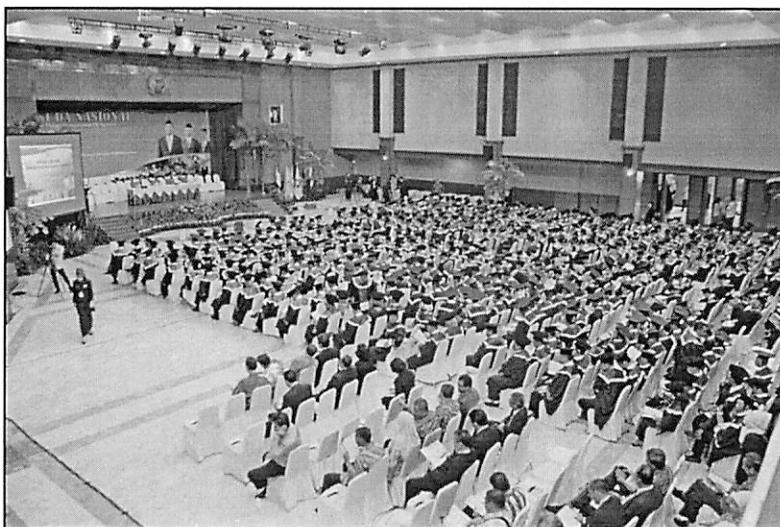
No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pendidikan formal pasca sarjana bagi aparatur pertanian (orang)	230	229	99,57
2.	Pendidikan tinggi kedinasan bagi aparatur pertanian (orang)	2.651	2.605	98,26
3.	Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi pertanian (unit)	183	177	96,72
4.	Fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan tinggi pertanian (orang)	736	885	120,24
5.	Standardisasi profesi bidang pertanian (dok SKKNI)	3	2	66,67
6.	Sertifikasi profesi bagi SDM Pertanian (orang)	500	484	96,80
7.	Dokumen program dan kerjasama bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan	27	27	100,00
8.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (orang)	12	12	100,00
Rata-rata				97,28

Seperti disajikan pada Tabel 11, realisasi kegiatan tertinggi adalah **fasilitasi dan pengembangan ketenagaan pendidikan tinggi pertanian** sedangkan realisasi terendah adalah **standardisasi profesi bidang pertanian**. Kegiatan penyusunan SKKNI terkena penghematan anggaran untuk mendukung wisuda nasional, sehingga rencananya akan menghasilkan 3 dokumen, direvisi menjadi 2 dokumen. Dua dokumen yang dihasilkan adalah SKKNI yaitu Pengembangan Bibit Ternak dan Juru Sembelih Halal.



Gambar 4. Proses Penyelenggaraan Pendidikan di STPP Gowa

Fasilitasi pendidikan tinggi kedinasan bagi aparatur pertanian di STPP tidak bisa mencapai 100%, dikarenakan beberapa pemerintah daerah yang menjadi target tidak mengirimkan penyuluh PNS-nya untuk melanjutkan pendidikan di STPP, ditiadakannya program alih jenjang di STPP, terdapat mahasiswa yang mengundurkan diri, *drop out* maupun meninggal dunia. Sertifikasi profesi tidak mencapai 100% disebabkan karena para penyuluh pertanian yang akan mengikuti sertifikasi profesi tidak lolos dalam seleksi pemberkasan



Gambar 5. Acara Wisuda Nasional STPP Tahun 2014

d. Pendidikan Menengah Pertanian

Realisasi anggaran untuk kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian pada tahun 2014 mencapai 92,50%. Capaian realisasi fisik sebesar 100,42%, dengan realisasi masing-masing kegiatan tersaji pada Tabel 12.

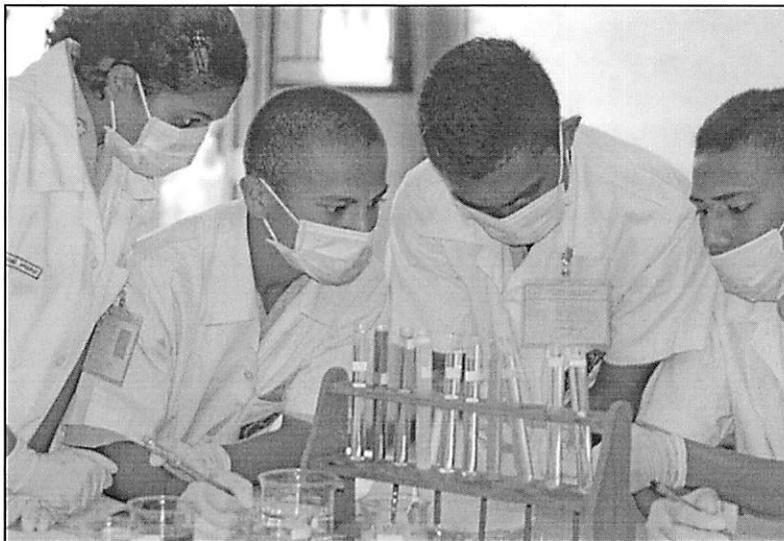
Tabel 12.
Realisasi Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian
Tahun 2014

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Pendidikan menengah bagi generasi muda pertanian (orang).	18.077	18.499	102,33
2.	Fasilitasi dan pengembangan Kelembagaan SMK-SPP (unit)	442	365	82,56
3.	Fasilitasi dan pengembangan Ketenagaan SMK-SPP (orang)	744	872	117,20
4.	Dokumen program dan kerjasama bidang pendidikan pertanian yang dihasilkan	23	23	100,00
5.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	100,00
Rata-rata				100,42



Gambar 6. Kegiatan Praktek Lapang oleh siswa di SMK-PP Banjarbaru

Apabila dilihat pada Tabel 12, capaian realisasi tertinggi adalah Fasilitasi dan Pengembangan Ketengaan SMK-PP, sedangkan capaian terendah adalah Fasilitasi dan Pengembangan Kelembagaan SMK-PP.



Gambar 7. Kegiatan Belajar Mengajar di Laboratorium SMK-PP Kupang

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Realisasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukung Teknis Lainnya pada tahun 2014 mencapai 93,18%. Capaian realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan rincian kegiatan tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13.
Realisasi Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Tahun 2014

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Penyediaan dokumen Perencanaan, Perundang-undangan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, Keuangan dan Perlengkapan serta Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	281	281	100,00
2.	Pelaksanaan pelayanan perkantoran	12	12	100,00
Rata-rata				100,00



Gambar 8. Kegiatan Koordinasi dalam Rapat Pimpinan Lingkup BPPSDMP

Secara umum, capaian tertinggi dicapai oleh kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar 107,81% dan terendah oleh kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian sebesar 97,28%.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan/pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP pada tahun 2014 adalah pada masing-masing kegiatan utama secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
 - a. Belum semua Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan membentuk Kelembagaan Penyuluhan sesuai Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 dan belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Belum optimalnya peran Balai Penyuluhan Kecamatan/ Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) dalam mengkoordinasikan dan mensinkronkan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan;
 - c. Berkurangnya jumlah penyuluh, menurunnya kualitas penyuluh, minimnya formasi CPNS bagi penyuluh, mayoritas usia penyuluh PNS di atas 50 tahun dan minimnya pelatihan bagi penyuluh.;
 - d. Peraturan Pemerintah Tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan sebagai payung hukum pengangkatan Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB) Penyuluh sebanyak 10.000 orang formasi 2014 belum terbit. PP tersebut merupakan komitmen antara DPR (Komisi IV DPR RI) dengan Pemerintah (Kementerian Pertanian, Kementerian PAN-RB);
 - e. Lemahnya kapasitas petani dan kelembagaan petani;
 - f. Belum optimalnya transfer teknologi dari sumber informasi ke petani;
 - g. Belum optimalnya dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh.
2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
 - a. Jumlah, sebaran, kapasitas dan kompetensi penyelenggara kediklatan (Widyaiswara & Tenaga Kediklatan) yang belum optimal;
 - b. Belum optimalnya prasarana dan sarana kediklatan (asrama, kelas, laboratorium, sarana praktek);

- c. Kurang optimalnya anggaran pelatihan dalam memfasilitasi kebutuhan lingkup eselon I Kementerian Pertanian;
 - d. Belum optimalnya pelenggaraan kerjasama diklat dengan Pemerintah Daerah, Swasta, dan lain-lain;
 - e. Belum optimalnya penilaian terhadap P4S dalam penyelenggaraan pelatihan bagi petani;
 - f. Alokasi anggaran yang belum dapat memfasilitasikan diklat.
3. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
- a. Kelembagaan pendidikan pertanian (STPP dan SMK-PP) belum sepenuhnya standar dan mutu layanan;
 - b. Rendahnya minat PNS melanjutkan pendidikan ke STPP;
 - c. Eselon I lingkup Kementerian Pertanian belum sepenuhnya memanfaatkan keberadaan STPP dan SMK-PP;
 - d. Minimnya sarana-prasarana UPT Pendidikan (STPP dan SMK-PP);
 - e. Belum optimalnya kerjasama/koordinasi lintas sektor bidang pendidikan pertanian;
 - f. Rendahnya kesadaran masyarakat pertanian tentang manfaat dan pentingnya sertifikasi profesi.
4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya
- a. Kinerja pegawai masih terdapat perbedaan antara jabatan yang dipangku dengan tugas jabatan yang dilaksanakan, karena adanya mutasi dan rotasi;
 - b. Pengendalian atas aset belum sepenuhnya terkelola secara optimal, hal ini karena masih terdapat aset UPT yang belum bersertifikat (BBPP Kupang dan STPP Medan). Selain itu, penggunaan asset milik Pemda untuk bangunan Balai dan STPP sedang dalam penyelesaian proses hibah dan saat ini menggunakan perjanjian pinjam pakai dengan pemerintah daerah;
 - c. Peran Satuan Pengendalian Intern (SPI) belum sepenuhnya sebagai sarana pengendalian sekaligus peringatan dini;
 - d. Kurang tertibnya penyampaian laporan rutin (Laporan Keuangan, Laporan e-evaluation, Laporan Pengukuran Kinerja/PMK 249, Laporan SPI) dari satker lingkup BPPSDMP.

B. Upaya Tindak Lanjut

Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan dan kendala tersebut akan ditempuh upaya sebagai berikut:

1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

- a. Meningkatkan advokasi dalam pembentukan kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. Memperkuat BP3K dengan menyediakan dana operasionalisasi sebagai simpul koordinasi program dan kegiatan lintas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian juga lintas Kementerian dan sebagai pusat data (*cyber extension* dan *sms center*);
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan penyuluh swadaya melalui rekrutmen, fasilitasi dan pelatihan metodologi penyuluhan;
- d. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan petani melalui kerjasama pelaksanaan pelatihan dengan SKPD daerah dan pemberdayaan P4S (Pusat Pelatihan Pengembangan Perdesaan Swadaya) sebagai tempat pelatihan bagi petani, serta penguatan kelembagaan petani & kelembagaan ekonomi petani
- e. Meningkatkan peran diseminasi teknologi dengan meningkatkan pertemuan gelar teknologi di tingkat petani;
- f. Memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penguatan kelengkapan fasilitas BP3K.

2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

- a. Mengidentifikasi kembali kebutuhan widyaiswara baik jumlah maupun kompetensi per UPT mengacu pada rencana induk pengembangan;
- b. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas sarana-prasarana kediklatan;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Eselon I lingkup Kementerian, Pemda Provinsi dan Kabupaten serta stakeholder dan pihak swasta dengan lebih mengoptimalkan promosi, komunikasi dan koordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan latihan;
- d. Mengembangkan pola pembiayaan *cost sharing* dan pengembangannya metoda pelatihan pola pelatihan di tempat kerja dan latihan keliling;

- e. Melaksanakan pembinaan dalam hal manajemen kepemimpinan pengelola dan infrastruktur P4S.
3. Revitalisasi Sistem Pendidikan, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian
 - a. Meningkatkan sosialisasi kegiatan pendidikan di STPP pada wilayah penerimaan mahasiswa STPP baik di pemerintah daerah, eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. Meningkatkan peran STPP dalam mendukung program pembangunan pertanian;
 - c. Mengoptimalkan dan meningkatkan sarana-prasarana pendidikan pertanian melalui dukungan kerjasama;
 - d. Meningkatkan promosi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya tentang pentingnya sertifikasi profesi khusus dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.
 4. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya.
 - a. Melakukan penataan pegawai sesuai dengan nama jabatan dan tugas jabatan serta Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan tugas jabatan yang dikerjakan;
 - b. Melakukan upaya terkait dengan penyelesaian asset lingkup Badan PPSDMP yang bermasalah;
 - c. Meningkatkan peran SPI dalam pengendalian sekaligus peringatan dini bagi pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan PPSDMP;
 - d. Memberikan teguran kepada Satker yang belum tertib dalam penyampaian laporan, dan memberikan apresiasi terhadap satker yang tertib adminitrasi

BAB V

PENUTUP

BPPSDMP pada tahun 2014 melaksanakan Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani. Operasionalisasi Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani yang diwujudkan melalui program-program aksi atau kegiatan utama BPPSDMP yaitu:

1. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian;
2. Pemantapan sistem pelatihan pertanian;
3. Revitalisasi sistem pendidikan, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
4. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Realisasi serapan anggaran BPPSDMP pada tahun 2014, secara menyeluruh mencapai 95,46%. Secara umum, capaian tertinggi dicapai oleh kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar 107,81% dan terendah oleh kegiatan Revitalisasi Sistem Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian sebesar 97,28%.

Dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan tersebut Badan PPSDMP didukung oleh satker pusat; 20 Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat; 34 Satuan Kerja (Satker) Dekonsentrasi Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi (Dinas/Badan), serta 5 Satker Tugas Pembantuan Pemerintah Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota (Dinas/Badan). Selain itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat, baik pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lain juga menjadi salah satu faktor kunci pencapaian kegiatan pada tahun 2014.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan utama mempunyai permasalahan/kendala dan telah direkomendasikan tindak lanjut yang bisa ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kiranya Laporan Tahunan ini dapat memberikan masukan kepada para pemangku kepentingan terkait untuk dapat digunakan sebagai penetapan kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian ke depan.

Lampiran 1.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
TAHUN 2014**

Lampiran 2.

**KOMPOSISI PEGAWAI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER DESEMBER 2014**

**KOMPOSISI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER DESEMBER 2014**

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN																				TOTAL				
		I				II				III				IV				JUMLAH								
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		e							
1	Badan PPSDMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	-	-	1	2	3	5	10	14	13	42	13	49	29	13	104	8	6	3	1	-	18	167			
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	-	-	-	-	-	1	4	2	4	11	4	10	6	19	39	7	7	5	4	1	24	74			
4	Pusat Pelatihan Pertanian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	15	8	12	39	6	2	1	-	-	9	50			
5	Pusat Dikdikasi Pertanian	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	6	10	6	5	27	8	3	-	1	-	12	42			
6	PPMKP Cawi	-	12	9	13	22	23	16	19	14	72	21	24	13	12	70	7	7	3	4	1	22	186			
7	STPP Medan	-	-	-	-	-	2	9	7	5	23	6	21	6	13	46	2	2	3	-	-	7	76			
8	STPP Bogor	-	13	2	5	7	5	12	9	8	34	12	35	10	21	78	8	6	9	3	-	26	145			
9	STPP Magelang	-	2	1	5	6	9	25	8	20	62	21	33	34	30	118	16	9	5	-	-	30	216			
10	STPP Malang	-	6	2	4	6	9	10	19	9	47	13	32	17	19	81	7	8	5	1	-	21	155			
11	STPP Gowa	-	-	-	-	-	-	10	5	1	16	20	16	11	16	63	6	10	4	1	-	21	100			
12	STPP Manokwari	-	2	3	1	4	5	3	2	1	11	11	5	16	8	40	6	-	1	-	-	7	62			
13	BBPP Lembang	-	-	-	-	-	5	16	10	4	35	15	25	16	9	65	9	5	6	2	-	22	122			
14	BBPKH Cinagara	-	5	-	2	2	-	6	2	4	12	14	8	9	9	40	6	3	2	2	2	15	69			
15	BBPP Batu	-	1	4	3	7	5	11	8	5	29	9	17	9	10	45	7	5	1	-	-	13	94			
16	BBPP Ketandan	-	1	-	2	2	5	12	2	7	26	12	20	7	10	49	10	2	3	1	1	17	94			
17	BBPP Batangkaluku	-	-	5	2	7	8	8	10	4	30	16	14	8	6	44	5	5	1	-	-	11	92			
18	BBPP Binuang	-	-	3	3	6	6	2	6	2	16	6	11	7	8	32	3	2	3	-	-	8	62			
19	BBPP Kupang	-	-	1	1	2	2	9	4	8	23	11	14	9	6	40	4	1	2	-	-	7	72			
20	BPP Jambi	-	2	-	1	1	5	17	4	2	28	11	19	4	9	43	4	2	1	-	-	7	79			
21	BPP Lampung	-	1	2	3	5	4	4	3	3	14	14	9	5	3	31	5	7	1	1	1	14	64			
22	SMK-PPN Sembawa	-	-	1	3	4	5	11	8	4	28	15	15	9	3	42	8	-	-	-	-	8	82			
23	SMK-PPN Banjarbaru	-	-	-	1	1	6	4	2	4	16	15	16	2	5	38	6	1	-	-	-	7	62			
24	SMK-PPN Kupang	-	-	-	3	3	3	9	2	2	16	13	19	9	4	45	-	-	-	-	-	-	64			
Total		-	45	34	54	133	109	215	148	124	596	282	437	250	250	1,219	148	93	59	22	5	327	2,275			

Lampiran 3.

**KOMPOSISI PEGAWAI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER DESEMBER 2014**

**KOMPOSISI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER DESEMBER 2014**

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN											JUMLAH				
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD					
1	Badan PPSDMP	1															1
2	Sekretariat Badan	3	26	59	2	2					10				8	5	167
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	2	19	40												1	74
4	Pusat Pelatihan Pertanian	1	13	22	1	1					2				1		50
5	Pusat Dikdikasi Pertanian	3	12	17	2						1						42
6	PPMKP Cawi	1	29	35		1					4				18	43	198
7	STPP Medan	1	25	14	6						3				1	1	76
8	STPP Bogor	8	41	26	17						1				10	19	158
9	STPP Magelang	9	43	54	28	1					10				7	9	218
10	STPP Malang	10	43	19	19	1					8				6	10	161
11	STPP Gowa	7	32	26	19						3						100
12	STPP Manokwari	2	15	22	8						1				2	6	64
13	BBPP Lembang	1	32	44	2	1					4				3	3	122
14	BBPKH Cinagara		19	20	7						3				3	6	74
15	BBPP Batu	4	12	25	8						8				2	7	95
16	BBPP Ketindan	1	21	33	6						5				5	5	95
17	BBPP Batangkaluku	1	23	23	2						4				5	6	92
18	BBPP Binuang		8	17	3						2				4	3	62
19	BBPP Kupang		9	20	7						6					3	72
20	BPP Jambi	1	16	20	5						1					3	81
21	BPP Lampung		8	30	1						3				5	2	65
22	SMK-PPN Sembawa		11	29	6						1				5	2	82
23	SMK-PPN Banjarbaru		9	25	2						1				3	2	62
24	SMK-PPN Kupang		9	21	6										3	4	64
	Total	56	475	641	157	7	81	3	-	624	91	140	2,275				

Lampiran 4.

**KOMPOSISI PEGAWAI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER DESEMBER 2014**

**KOMPOSISI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER DESEMBER 2014**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Badan PPSDMP	1	-	1
2	Sekretariat Badan	103	64	167
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	39	35	74
4	Pusat Pelatihan Pertanian	22	28	50
5	Pusat Dikdikarsi Pertanian	16	26	42
6	PPMKP Ciawi	139	59	198
7	STPP Medan	45	31	76
8	STPP Bogor	111	47	158
9	STPP Magelang	147	71	218
10	STPP Malang	126	35	161
11	STPP Gowa	67	33	100
12	STPP Manokwari	46	18	64
13	BBPP Lembang	79	43	122
14	BBPKH Cinagara	51	23	74
15	BBPP Batu	68	27	95
16	BBPP Ketindan	58	37	95
17	BBPP Batangkaluku	64	28	92
18	BBPP Binuang	46	16	62
19	BBPP Kupang	52	20	72
20	BPP Jambi	57	24	81
21	BPP Lampung	44	21	65
22	SMK-PPN Sembawa	57	25	82
23	SMK-PPN Banjarbaru	44	18	62
24	SMK-PPN Kupang	53	11	64
Total		1,535	740	2,275